

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, tinjauan pustaka disajikan untuk memberikan gambaran konsep dasar mengenai variabel yang akan diteliti dan dilandasi dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya, pembahasan mengenai kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen yang kemudian diikuti oleh hipotesis yang akan diajukan.

2.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Menurut Todaro & Smith (2012) dalam Kartika et al., (2024) pembangunan manusia merupakan pembangunan yang memiliki sistem serta mempunyai maksud dan tujuan untuk lebih banyak pilihan, khususnya dalam hal pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Pembangunan juga merupakan suatu proses membuat sesuatu baru atau meningkatkan kualitas sesuatu yang sudah ada sebelumnya.

Sedangkan, menurut Amartya Sen pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang mencakup makanan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya (Iswahyudi & Asnawi, 2024). Jika kebutuhan dasarnya dipenuhi, maka manusia dapat secara bebas berkontribusi bagi pembangunan nasional sehingga, dalam konsep pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan ekonomi, tetapi kebebasan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan (BPS, 2024).

Peran manusia dalam pembangunan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu berumur panjang dan sehat, berpendidikan, serta hidup layak. Konsep pembangunan manusia kemudian diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1990 dalam BPS (2024) yaitu laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) tentang pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang dikenal Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup manusia sebagai pencapaian keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1990 dalam BPS (2024), indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil dari pembangunan melalui kesehatan, pendidikan, pendapatan, serta aspek lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan kehidupan yang layak.

Pengukuran pembangunan manusia di Indonesia mengadopsi pengukuran yang sama dengan UNDP, yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga dimensi, diantaranya dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut terdapat empat indikator penyusun, yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (HLS), serta pengeluaran riil per kapita.

2.1.2.1 Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam menghitung indeks pembangunan manusia, terdapat tiga komponen dasar yang harus dilakukan perhitungannya terlebih dahulu dengan ketentuan batas maksimum dan minimum, yaitu:

Tabel 2. 1
Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	1.007,436 ¹	26.572,352 ²

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Catatan: ¹ Garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010, yaitu di Tolikara, Papua

² Nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJN) yaitu perkiraan pengeluaran per Kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Adapun perhitungan untuk masing-masing komponen Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS (2024) adalah sebagai berikut.

1. Indeks Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Data yang digunakan dalam perhitungan ini, yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Pengukuran Indeks UHH menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

2. Indeks Pengetahuan

Indikator yang digunakan untuk mengukur komponen pengetahuan adalah harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Sedangkan, rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Adapun rumus yang digunakan menghitung indeks harapan lama sekolah, yaitu:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Sedangkan, rumus yang digunakan untuk menghitung indeks rata-rata lama sekolah adalah:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Untuk memperoleh nilai indeks pengetahuan, yaitu dengan menggabungkan nilai indeks harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Indeks Pengeluaran

Dimensi standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari membaiknya ekonomi. Untuk mengukur standar hidup layak UNDP menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan di Indonesia standar hidup layak diukur dengan menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang

disesuaikan dengan paritas daya beli. Rumus indeks pengeluaran, yaitu:

$$I_{Pengeluaran} = \frac{1n(Pengeluaran) - 1n(Pengeluaran_{min})}{1n(Pengeluaran_{maks}) - 1n(Pengeluaran_{min})}$$

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung sebagai rata-rata ukur atau geometrik dari tiga indeks di atas:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{Pengetahuan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

2.1.2.2 Status Pembangunan Manusia

Status pembangunan manusia dikelompokkan menjadi empat kelompok yang bertujuan untuk mengklasifikasi daerah-daerah berdasarkan capaian IPM yang sama. Pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut.

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan perkiraan belanja yang digunakan untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan keuntungan lebih banyak dalam satu periode pelaporan. Belanja yang termasuk dalam belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta aset tidak berwujud.

Syaiful (2006) dalam Priyatmo et al., (2024) belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membentuk modal yang pada umumnya menyebabkan bertambahnya aset tetap dengan lama kegunaan lebih banyak dari satu periode pelaporan. Belanja dalam rangka pemeliharaan bertujuan guna menambah kurun waktu pemanfaatan atau mempertahankannya, serta menambah jumlah dan aset yang berkualitas juga merupakan bagian dari belanja modal.

Menurut Abdul (2002) dalam Nisa & Handayani (2021) menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah dengan menambah aset atau kekayaan daerah sehingga dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik.

Belanja modal dapat membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut, dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan akses ke layanan publik sehingga dengan adanya belanja modal juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat (Syafira & Triani, 2021) dalam (Jatnika et al., 2024).

2.1.3.2 Kategori Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 bahwa belanja modal diklasifikasikan dalam lima kategori utama diantaranya:

1. Belanja Modal Tanah

Pengeluaran ini mencakup biaya untuk pengadaan, pembelian, penyelesaian, pengalihan hak milik, dan penyewaan tanah; serta biaya untuk pengosongan, pengurugan, pembelian peralatan, penyiapan tanah, pembuatan sertifikat, dan berbagai biaya lain yang terkait dengan memperoleh hak atas tanah hingga siap digunakan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran ini mencakup biaya untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, hingga peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran ini mencakup biaya untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian dalam rangka perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang meningkatkan kapasitas, hingga gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran ini meliputi biaya untuk pengadaan, penambahan, atau peningkatan dalam hal pembangunan, pembuatan, dan perawatan

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau peningkatan pembangunan, pembuatan, dan perawatan terhadap aset fisik lain yang tidak termasuk dalam kategori lainnya. Belanja modal ini diarahkan untuk menciptakan multiplier effect (efek jangka panjang) baik secara makro maupun

mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya di daerah. Pemerintah daerah menyediakan dana dalam bentuk belanja modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap milik daerah. Setiap tahun, pemerintah daerah melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang bertujuan memberikan dampak finansial jangka panjang.

2.1.4 Upah Minimum

2.1.4.1 Pengupahan

Upah adalah jumlah yang ditetapkan pengganti dari jasa yang telah dikeluarkan oleh seorang pekerja dengan meliputi masa atau syarat tertentu. Upah disebut juga sebagai imbalan atas usaha yang diberikan pekerja kepada pengusaha. Namun, tidak semua perusahaan yang secara sadar dan sukarela meningkatkan penghidupan pekerjanya sehingga pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk mencegah rendahnya upah yang didapatkan, terutama pekerja golongan rendah (Putra et al., 2022).

2.1.4.2 Jenis-Jenis Upah

Menurut Sadono Sukirno dalam Putra et al., (2022) upah yang diterima oleh pekerja dibedakan dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Upah Nominal, yaitu upah yang diterima dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas tenaga pekerja yang digunakan dalam proses produksi
2. Upah Riil, yaitu tingkat upah yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pekerja

2.1.4.3 Konsep Upah Minimum

Menurut Pasal 88 UU No.6 Tahun 2023 bahwa kebijakan pengupahan ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penyesuaian upah minimum ini dilakukan setiap tahun dimana dalam perhitungan upah minimum, pemerintah mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu di setiap daerah sehingga upah minimum tidak berlaku secara nasional, melainkan berdasarkan wilayah provinsi dan kota/kabupaten (Suprihanto & Putri, 2021)

Penetapan upah minimum terdiri atas:

1. Upah Minimum berdasarkan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Upah Minimum provinsi wajib ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penetapan upah minimum dapat dilakukan oleh gubernur dimana upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

2. Upah Minimum Sektoral pada Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Upah minimum ini ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi. Sedangkan, nilai upah minimum sektoral kab/kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kab/kota.

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, serta pendidikan. Menurut Nugroho (2004) dalam Guritno (2024), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, yaitu kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, serta kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi.

Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu, garis kemiskinan makanan (GKM) yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan 2.100 kalori per kapita per hari. Kemudian, terdapat garis kemiskinan non-makanan (GKNM) yaitu kebutuhan minimum untuk sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (BPS, 2024).

2.1.5.1 Faktor–Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro dalam Soelistyo (2023), penyebab dari masalah kemiskinan adalah sebagai berikut.

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan terhadap sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang timpang
2. Kemiskinan muncul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM yang rendah mengakibatkan produktivitas yang rendah.
3. Kemiskinan muncul karena perbedaan terhadap akses dalam modal.

2.1.5.2 Konsep-Konsep Kemiskinan

Menurut Suharto (2005) dalam Soelistyo (2023) menjelaskan bahwa konsep kemiskinan dibedakan menjadi empat macam, diantaranya sebagai berikut.

1. Kemiskinan Absolut

Yaitu, keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Indikator kemiskinan absolut diukur pada batas kemiskinan atau garis kemiskinan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang dialami individu atau kelompok dengan membandingkan kondisi umum suatu masyarakat. Semakin besar ketimpangan antar penghidupan golongan atas dan bawah maka semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, sosial, dan budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat modern. Kemiskinan ini muncul akibat tidak adanya kemauan seseorang untuk memperbaiki taraf hidupnya.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan struktural, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi yang membuat akses terhadap sumber-sumber penghidupan terbatas bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis menggunakan referensi dari jurnal rujukan ataupun artikel ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun untuk memperkuat hasil analisis yang dilakukan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah (Nisa & Handayani, 2021)	• Belanja Modal • IPM.	• Pertumbuhan Ekonomi • PMDN • PMA.	Secara parsial pertumbuhan ekonomi dan PMA tidak berpengaruh signifikan, sedangkan PMDN dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, berpengaruh signifikan.	Diponegoro Journal Of Economics. Vol. 10, No.1, Tahun 2021. ISSN: 2337-3814
2.	Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah, Upah Minimum Provinsi, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. (Lestari, 2023)	• Upah Minimum • Kemiskinan • IPM.	• Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).	Dana ZIS memiliki hubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan upah minimum provinsi dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan.	Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam. Vol.4 No 2, Agustus 2023. ISSN: 2745-8407.
3.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Indeks	• Belanja Modal • IPM	• PAD • DAU • DAK	Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan. Sedangkan, DAK dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan, secara simultan	Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.2, Sept 2021 ISSN: 1978-0125 (Print) ISSN: 2615-8116 (Online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat)			berpengaruh signifikan.	
	(Irianto et al., 2021)				
4.	Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.	• Upah Minimum • IPM	• PMDN • Keluhan Kesehatan	PMDN dan Upah Minimum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan keluhan kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan.	Jurnal Ekbis (Ekonomi & Bisnis) Politeknik Piksi Ganesha. ISSN Online: 2722-4082, Print : 2339-1839 Volume 12 Nomor 2, Desember 2024.
	(Pradana et al., 2024)				
5.	Analysis Of The Effect Of Economic Growth, Percentage Of Poor People, And Open Unemployment Rate On The Human Development Index In East Kalimantan Province.	• Tingkat Kemiskinan • IPM	• Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan berpengaruh signifikan	Jurnal Ekonomi. Vol.12 No.04 (2023). p-ISSN: 2301-6280 e-ISSN: 2721-9879
	(Mardiko & Rospida, 2023)				
6.	Dampak Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau.	• Belanja Modal • Upah Minimum • IPM	• Pertumbuhan Ekonomi.	Belanja modal berdampak positif namun tidak signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan berpengaruh signifikan.	EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi. Vol.3, No.5, Juli 2024. ISSN: 2828-5298 (online)
	(Pratama & Ariza, 2024)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017. (Imelda et al., 2021)	• Upah Minimum • IPM	• Pendidikan • PDRB	Secara parsial dan simultan variabel pendidikan, PDRB, dan upah minimum berpengaruh signifikan.	Bharanomics. Volume 1, No. 2, 2021. ISSN (Online): 2774-7190
8.	Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Penanaman Modal Asing (PMA), Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia (Studi Kasus 11 Provinsi Ipm Lower Medium).	• Upah Minimum • IPM	• PMA • PDRB	Secara parsial UMP dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan PMA berpengaruh negatif signifikan, dan secara simultan berpengaruh signifikan.	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Volume 07, Nomor 1, 2024. E-ISSN: 2615- 126X
9.	Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. (Faizin, 2021)	• Upah Minimum • Kemiskinan • IPM	• Pengangguran -an	Secara parsial, upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan, kemiskinan berpengaruh negatif tidak signifikan, dan pengangguran memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Secara simultan, berpengaruh signifikan.	Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis. Vol.12, No.2, Juli 2021. P-ISSN 2089-1989 E-ISSN 2614-1523

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Di 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun 2011 -2019. (Handayani & Woyanti, 2021)	• Belanja Modal • Kemiskinan • IPM.	• PDRB • Pengangguran	PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pengangguran dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan.	BISECER (Business Economic Entrepreneurship) Vol. 4 No. 2, Juli 2021. P-ISSN: 2599-3097 E-ISSN: 2714-9986
11.	Analysis of factors affecting the level of the human development index. (Putri et al., 2022)	• Belanja • Modal • Kemiskinan • IPM	• Tingkat Pertumbuhan Ekonomi • Belanja Fungsi Kesehatan • Belanja Fungsi Pendidikan.	Secara parsial tingkat kemiskinan dan belanja fungsi kesehatan berpengaruh negatif, sedangkan belanja fungsi pendidikan berpengaruh positif. Namun, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan.	Asian Journal Of Economics And Business Management. 2022, Vol. 1, No. 3, 218 – 22
12.	Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten. (Maulana et al., 2022)	• Jumlah Penduduk Miskin • IPM	• Tingkat Pengangguran • PDRB	Secara simultan berpengaruh signifikan, sedangkan secara parsial PDRB, tingkat pengangguran dan penduduk miskin berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan.	EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4 No. 2 Nov 2022. E-ISSN: 2614 - 7181

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. (Kasnelly & Wardiah, 2024)	• Kemiskinan • IPM.	• Tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran dan kemiskinan berpengaruh sebesar 92 %. Secara parsial, tingkat pengangguran sebesar berdampak positif dan tidak signifikan. Sedangkan, tingkat kemiskinan berdampak negatif dan signifikan.	Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah e- ISSN: 2656-968X, p-ISSN: 2685-4228 Volume 4, Edisi II (Desember, 2021)
14.	Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. (Hidayat & Perwithosuci, 2024)	• Upah Minimum • Jumlah Penduduk Miskin/ Kemiskinan • IPM	• PDRB Perkapita • Tenaga Kerja.	PDRB Perkapita dan Upah minimum berpengaruh positif. Sedangkan, Tenaga kerja dan kemiskinan tidak berpengaruh. Secara simultan berpengaruh signifikan.	EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 24, No.1 Juli 2024 P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat : Perspektif Ekonomi Islam.	• Kemiskinan • IPM.	• Desentralisasi Fiskal • Tingkat Pengangguran	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan, kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.	Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Volume 23, Nomor 1, 2024, pp 59-71. ISSN: 1978-4007 (Print) 2655-9943 (Online).
	(Kartika et al., 2024)				

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara belanja modal, upah minimum, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia.

2.3.1 Hubungan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia

Belanja modal merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jatnika et al., (2024), belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan pelayanan publik. Belanja modal ini meliputi penambahan aset tetap atau aset lainnya, seperti tanah, bangunan, infrastruktur, atau fasilitas publik lainnya. Dengan adanya peningkatan realisasi belanja modal masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan fasilitas dan pelayanan publik yang lebih baik sehingga kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya yang artinya capaian pembangunan manusia pun ikut meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan kajian empiris yang dilakukan oleh Handayani & Woyanti (2021) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya, peningkatan belanja modal dapat meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia.

2.3.2 Hubungan Upah Minimum dengan Indeks Pembangunan Manusia

Penetapan upah minimum dilakukan pemerintah untuk mencegah pekerja/buruh mendapatkan upah yang rendah. Upah minimum bertujuan untuk mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak. Mahihody et al. (2018) dalam Pratama & Ariza (2024) menyimpulkan bahwa peningkatan upah minimum akan meningkatkan standar kehidupan yang layak. Dengan adanya upah minimum pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti menjaga hidup sehat dan memperoleh pendidikan yang layak untuk dirinya atau pula menghidupi keluarganya sehingga dengan memenuhi penghidupan yang layak dapat memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan pembangunan manusia.

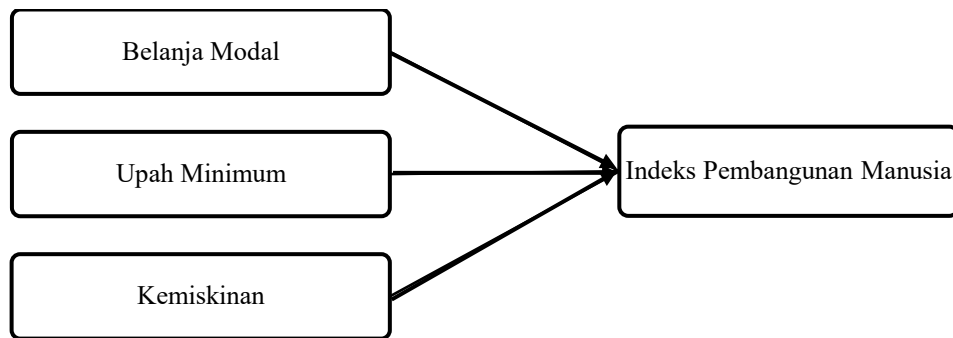
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nailufar et al., (2024) yang mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum akan meningkatkan kesejahteraan dari pendapatan yang diperoleh tenaga kerja, sehingga dapat memenuhi standar hidup layak yang merupakan salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Perwihosuci (2024) yang menyimpulkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dimana pekerja dapat meningkatkan kemampuan daya beli serta memenuhi kebutuhan dan fasilitas hidup yang layak.

2.3.3 Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat capaian keberhasilan pembangunan manusia. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan indikator dari pembangunan manusia. Jika seseorang atau masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut maka taraf hidup masyarakat pun lebih rendah. Kemiskinan merupakan sebuah masalah kompleks yang berawal dari ketidakmampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan ikut terabaikan, hal ini menyebabkan target untuk capaian keberhasilan pembangunan manusia pun tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2011) dalam (Handayani & Woyanti, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2022) dan Mardiko & Rospida, (2023) membuktikan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya, peningkatan jumlah kemiskinan dapat menurunkan capaian keberhasilan pembangunan manusia.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tiga variabel independen, yaitu belanja modal, upah minimum, dan kemiskinan yang akan diuji pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan. Dengan demikian, dapat dirumuskan paradigma sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial belanja modal dan upah minimum berpengaruh positif, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan tahun 2017-2024.
2. Diduga secara bersama-sama belanja modal, upah minimum, dan kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa dan Kalimantan tahun 2017-2024.